



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	1&2
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 (28) 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



**DISERAHKAN:** Wakil Bupati Pessel Rudi Hariyansyah menerima penghargaan dari Kemenkeu RI melalui Gubernur Sumbar Mahyeldi didampingi Kepala Kanwil DPJb Sumbar, Pudyo Nugroho.

## Raih WTP 5x Beruntun, Pessel Terima Reward

**Painan, Padek**—Pembka Pesisir Selatan (Pessel) melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) berupaya untuk terus meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam melaksanakan pembangunan bidang pemerintahan dan keuangan.

» Baca *Raih...*Hal 2

## Raih WTP 5x Beruntun, Pessel Terima...

*Sambungan dari hal. 1*

Selain memacu penyerapan dana pembangunan yang sudah dialokasikan lewat APBD, daerah itu juga sukses mendapat penghargaan atas capaian Standar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020 dari Kementerian Keuangan RI.

Penghargaan yang diterima dari Kemenkeu RI pada Senin (25/10) lalu itu, atas keberhasilan Pessel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut (2016-2020) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Sumbar Mahyeldi didampingi Kepala Kanwil DPJb Sumbar Heru Pudyo Nugroho, kepada Pembka Pessel yang diterima Wakil Bupati Pessel Rudi Hariyansyah, di Auditorium Gubernur.

Wakil Bupati Pessel Rudi Hariyansyah didampingi Plt Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Pessel Intan Novia Fatma usai menerima penghargaan itu mengatakan, apa yang sudah diraih itu hasil kerja keras yang dilakukan selama ini. "Tidak mudah untuk mendapat opini WTP, sebab membutuhkan keseriusan, usaha dan kerja keras dari semua lini. Terutama, dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset. *Alhamdulillah*, tadi kita sudah menerima pe-



**DAPAT REWARD:** Wabup Pessel Rudi Hariyansyah (dua dari kanan) dan Plt Kepala BPKD Pessel Intan Novia Fatma (dua dari kiri).

nghargaan atas keberhasilan Pembka Pessel meraih opini WTP lima kali berturut-turut itu," katanya.

Rudi juga berharap seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah, selalu memegang prinsip transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Dengan demikian, lanjutnya, opini WTP dari hasil pemeriksaan LKPD akan tetap dapat dipertahankan di masa mendatang.

Bupati Pessel Rusma Yul Anwar ketika dihubungi Selasa (26/10), juga berharap agar opini WTP yang telah diraih selama lima kali berturut-turut itu dapat terus dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. "Jangan terlena atas prestasi yang sudah diraih, tapi tunjuk-

kanlah keseriusan dan kerja keras dalam mengelolah keuangan dan aset. Sebab, kedepan saya juga menargetkan puncak dari usaha dan kerja keras dalam mengelolah keuangan dan aset ini, tetap diraih pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan, bisa lebih ditingkatkan lagi," harapnya pula.

Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholders* bekerjasama menyampaikan dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga mendapat opini WTP lima tahun berturut-turut termasuk tahun 2020. "Atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan berterima kasih kepada seluruh perangkat daerah, berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan dengan

baik," ucapnya.

Plt Kepala BPKD Pessel, Intan Novia Fatma menambahkan bahwa Pessel hingga tahun 2020 itu telah memperoleh opini WTP delapan kali dari BPK RI.

"Karena Kemenkeu memberikan penghargaan bagi daerah yang memperoleh WTP lima kali dan 10 kali, sehingga Pessel masuk pada kategori lima tahun berturut-turut," jelasnya.

Ditambahkannya bahwa untuk mencapai opini WTP, Pembka Pessel memang sudah melakukan berbagai upaya dalam mengelola keuangan dan aset agar benar-benar sesuai yang diharapkan. "Salah satu upaya itu adalah melakukan penandatanganan nota kesepakatan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan semua kepala perangkat daerah. Tujuannya agar semua komponen dalam melaksanakan kegiatan dan program, saling berkoordinasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana arahan bupati," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa langkah itu salah satu strategi bagi Pessel melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai amanat Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. (yon)